## RANCANGAN AWAL (RANWAL)

# RENCANA KERJA (RENJA) **KECAMATAN SUNGAI LOBAN**KABUPATEN TANAH BUMBU



T A H U N 20025

Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024

Nomor: B / 900.1.1.2 / 165 / KSL-Keu / II / 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN SUNGAI LOBAN

Alamat : Jalan Pemerintahan No. 01 Sari Mulya Kode Pos 72274 *Email : sungailobankec@gmail.com* 

Website: www.sungailoban.tanahbumbukab.go.id

Sari Mulya, 05 Februari 2024

Yth. Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Tanah Bumbu
Di Gunung Tinggi

# **SURAT PENGANTAR**

Nomor: B/900.1.1.2/165/KSL-Keu/II/2024

No	Naskah Dinas / Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Hardcopy Rancangan Awal (Ranwal) RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI LOBAN TAHUN 2025	1 Dokumen	Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
2	Softcopy Rancangan Awal (Ranwal) RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI LOBAN TAHUN 2025	1 File PDF	

Diterima TanggalPenerima, Jabatan :	Pengirim Camat,
Nama : Pangkat : NIP :	AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P Pembina Tingkat I / IVb NIP 19710810 199803 1 012
No HD ·	

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dapat tersusun.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikatornya, program , kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Rancangan Awal Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sungai Loban, 05 Februari 2024

**AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P**Pembina Tingkat I / IVb
NIP 19710810 199803 1 012

## DAFTAR ISI

Kata	Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Bab I	Pen	dahuluan	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	7
	1.4	Sistematika Penulisan	8
Bab II	Has	il Evaluasi Renja Kecamatan Sungai Loban Tahun 2023	9
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu	9
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu	27
	2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu	30
	2.4	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	32
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
Bab III	Tuju	uan dan Sasaran Kecamatan Sungai Loban Kab Tanah Bumbu	46
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kec Sungai Loban Kabupaten TanahBumbu	54
Bab IV		cana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sungai Loban upaten Tanah Bumbu	46
	4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten TanahBumbu	57
Rah V	Den	utun	67

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Tabel 2.2 : Realisasi Keuangan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2023. : Pencapaian Kinerja Tunjangan dan Ssasaran Kecamatan Tabel 2.3 Sungai Loban kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan 2023 : Reviu terhadap rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Tabel 2.4 Bumbu Tahun 2025 Kecamatan Sungai Loban. Tabel 2.5. : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Sungai Loban kabupaten tanah Bumbu. Tabel 3.1 : Target Indikator Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025. Tabel 4.1 : Rumusan rancangan Program Kegiatan Tahun 2025 dan

Pemikiran maju Tahun 2026.

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025. Dimana penyusunan Rancangan Awal Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Sungai Loban, evaluasi pelaksanaan Renja tahuntahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Loban.

Selanjutnya Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

#### 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
- 18. Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026
- 19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2)
- 20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34)

#### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan sasaran Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terorganisir, sistematis dan diantaranya melalui secara target-target kinerja sebagai alat ukur penetapan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

# BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025.

#### BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

#### BAB II

#### HASIL EVALUASI RANCANGAN AWAL RENJA KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Loban

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hambatan/ serta permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dan Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2025.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 yakni sebagai berikut:

# 1). PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator kinerja outcome pada program ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks) yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan. dengan target 100%, terealisasi 96,41%. Hal ini dikarenakan pada Sub Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, belanja sub kegiatan tersebut kurang terealisasi dengan maksimal sesuai kebutuhan dan target kurang tercapai. dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan, diantaranya:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diukur dengan indikator kinerja Persentase administrasi keuangan perangat daerah yang terselenggara dengan baik (%) sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target 100 %, terealisasi 96.25 %. Pada kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, awal tahun anggaran sudah menargetkan 27 orang terealisasi 27 dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan dikarena ada 1 orang ASN yang mengalami sakit.
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, awal tahun anggaran sudah menargetkan 12 bulan terealisasi 12 bulan dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan.
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, diukur dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target 100 %, terealisasi 99,40 %. Pada kegiatan ini terdiri dari 5 sub

#### kegiatan, yaitu:

- 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, awal tahun anggaran sudah menargetkan 2 paket terealisasi 2 buah dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan.
- 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan harapan karena didukung dengan anggaran yang tersedia.

- 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, awal tahun anggaran sudah menargetkan 12 paket terealisasi 12 bulan dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan.
- 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, awal tahun anggaran sudah menargetkan 12 bulan terealisasi 12 bulan dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan
- 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, awal tahun anggaran sudah menganggarkan 1 kali terealisasi 1 kali dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan.
- **c.** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, diukur dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%) sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target 100 %, terealisasi 92,62 %. Pada kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, awal tahun anggaran sudah menargetkan 12 bulan terealisasi 12 bulan dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan namun anggaran tidak dapat maksimal di realisasikan dikarenakan menyesuaikan dengan bukti tagihan.
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, awal tahun anggaran sudah menargetkan 12 bulan terealisasi 12 bulan dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan.
- **d.** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, diukur dengan indikator Persentase milik daerah urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target 100 %, terealisasi 100 %. Pada kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, awal tahun anggaran sudah menargetkan 12 bulan terealisasi 12 bulan dan sub kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dapat terealisasi dengan baik karena tersedianya anggaran

sehingga pelaksanaan rehap Gedung Rumah Dinas dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Dari Tahapan perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja.

# 2). PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah diukur dengan indikator kinerja Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan. dengan target 100%, terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pada Sub Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, belanja sub kegiatan tersebut terealisasi sesuai kebutuhan sehingga tercapainya target. dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, diantaranya:

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, diukur dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan target 100 %, terealisasi 100 %. Pada kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, awal tahun anggaran sudah menargetkan 100% terealisasi 100 % dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan.

Dari tahapan perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja.

#### 3). PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah diukur dengan indikator kinerja Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku. dengan target 100%,

terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pada Sub Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, belanja sub kegiatan tersebut terealisasi sesuai kebutuhan sehingga tercapainya target. dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, diantaranya:

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa diukur dengan indikator kinerja Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan target 100 %, terealisasi 100 %. Pada kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, awal tahun anggaran sudah menargetkan 100% terealisasi 100% dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan.
  - 2). Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, awal tahun anggaran sudah menargetkan 100% terealisasi 100% dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tengan sesuai dengan harapan.

Dari tahapan perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja..

#### 4). PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah "Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)" berdasarkan Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023 sampai dengan TW IV, Rata-rata Capaian Kinerja program adalah 100 % dengan kategori Sangat Tinggi Pada program ini terdapat 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

5). PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator kinerja outcome pada program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang

Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan. dengan target 100%, terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pada Sub Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, belanja sub kegiatan tersebut terealisasi sesuai kebutuhan sehingga tercapainya target. dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, diantaranya:

- a. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** diukur dengan indikator kinerja
  Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
  Penugasan Kepala Daerah, dengan target 100 %, terealisasi 100 %.
  Pada kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
  - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, awal tahun anggaran sudah menargetkan 100% terealisasi 100% dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan.

Dari Tahapan perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja.

#### 6). PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator kinerja outcome pada program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dengan target 100%, terealisasi 100%.

Hal ini dikarenakan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, belanja sub kegiatan tersebut terealisasi sesuai kebutuhan sehingga tercapainya target. dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, diantaranya:

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, diukur dengan indikator kinerja Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan target 100 %, terealisasi 100 %. Pada kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
  - 1) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pada awal tahun anggaran sudah menargetkan 100% terealisasi 100% dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran

sub kegiatan tetap berjalan sesuai dengan harapan.

- 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, pada awal tahun anggaran sudah menargetkan 100% terealisasi 100 % dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan sesuai dengan harapan.
- 3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, pada awal tahun anggaran sudah menargetkan 100% terealisasi 100 % dan karena sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran sub kegiatan tetap berjalan sesuai dengan harapan.

Dari Tahapan perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja.

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (6 program) adalah masing-masing sebesar 99,77% dan 98,87 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini dikarnakan evaluasi capaian kinerja telah dilaksanakan sampai dengan Tri Wulan IV Tahun 2023.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Tri Wulan IV Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 (TC.29)

# Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

## SKPD : Kecamatan Sungai Loban

Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		get Akhir de Renstra	Cap Kin Ren san den Re	erja nstra npai igan inja n 2022	dan berja 2023	get kinerja anggaran alan tahun (n-1) yang evaluasi			Realisa	isi Kinerja San	npai De	ngan Triwulan			K Ang	isasi Capaian inerja dan garan Renja g dievaluasi (2023)	Tingkat ( Kinerj Real Anggara Tahun 2	a dan isasi ın Renja	dai Rens 2023 Pe	lisasi Kinerja n Anggaran tra s/d Tahun (Akhir Tahun elaksanaan nstra Tahun 2023)	Ca Kine Rea Ang Rens tahu	ngkat paian rja dan alisasi ggaran stra s/d n 2023 (%)
	K Rp		5	(	6		7		<u> </u>		9		10		IV 11		12	13=12/7	7x100%	1.	4 = 6 + 12		=14/5 00%
3	4	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	82, 60	20.373.6 86.160	0,0		83	3.850.95 5.985		631.167.8 55		1.247.64 0.894		763.629.5 95		1.162.22 2.830	-	3.804.661.1 74	0,00%	98,80 %	82, 00	3.804.661.1 74		18,67 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	100	18.350.4 73.660	0,0	,	100	3.226.84 0.935	25	591.989.8 15	25	1.145.82 8.046	25	682.609.0 97	25	772.147. 945	100	3.192.574.9 03	100,00	98,94 %	100	3.192.574.9 03	100 ,00 %	29,59 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		14.381.5 34.560	0,0	1	28	2.820.85 4.162	5	545.411.8 15	10	1.024.56 7.346	6	608.940.0 97	7	608.382. 692	28	2.787.301.9 50	100,00 %	98,81 %	28, 00	2.787.301.9 50	0,0	19,38 %
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3.968.93 9.100	0,0	-	13	405.986. 773	2	46.578.00 0	5	121.260. 700	3	73.669.00 0	3	163.765. 253	13	405.272.95 3	100,00 %	99,82	13, 00	405.272.95 3	0,0 0%	10,21 %

	(Dokumen)																						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	1.204.57 3.000	0,0	-	100	386.041. 600	25	11.531.00 0	25	44.530.8 00	25	43.009.00 0	25	284.650. 391	100	383.721.19 1	100,00 %	99,40	100	383.721.19 1	100 ,00 %	133,8 9%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		11.250.0 00	0,0	,	2	2.027.60 0	,	-	2	1.013.80	,	-	-	1.013.80	2	2.027.600	100,00 %	100,00 %	2,0	2.027.600	0,0	18,02 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		484.170. 000	0,0	-	1	153.400. 000	-	-	-	-	1	10.000.00	-	143.400. 000	1	153.400.00 0	100,00 %	100,00 %	1,0 0	153.400.00 0	0,0 0%	31,68 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		190.503. 000	0,0	,	12	10.000.0	2	1.614.000	4	3.228.00 0	3	2.859.000	3	2.299.00	12	10.000.000	100,00 %	100,00 %	12, 00	10.000.000	0,0 0%	5,25%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		14.100.0 00	0,0	-	12	2.750.00	3	750.000	-	-	9	2.000.000	-	-	12	2.750.000	100,00 %	100,00 %	12, 00	2.750.000	0,0 0%	19,50 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)		6.600.00 0	0,0	1	24	1.080.00	4	180.000	8	360.000	6	270.000	6	270.000	24	1.080.000	100,00 %	100,00 %	24, 00	1.080.000	0,0	16,36 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		497.950. 000	0,0	,	23	216.784. 000	3	8.987.000	12	39.929.0 00	8	27.880.00 0	-	137.667. 591	23	214.463.59 1	100,00 %	98,93 %	23, 00	214.463.59 1	0,0	43,07 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	577.889. 500	0,0	-	100	130.195. 450	25	16.797.04 0	25	31.882.0 48	25	20.811.49	25	51.096.4 94	100	120.587.08 0	100,00 %	92,62	100	120.587.08 0	100 ,00 %	48,66 %

	daerah (%)																						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		90.000.0	0,0	-	12	35.600.0 00	2	4.323.040	3	8.174.04 8	3	6.880.498	4	7.049.19 4	12	26.426.780	100,00 %	74,23 %	12, 00	26.426.780	0,0	29,36 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		487.889. 500	0,0	-	12	94.595.4 50	2	12.474.00 0	3	23.708.0 00	2	13.931.00 0	5	44.047.3 00	12	94.160.300	100,00 %	99,54 %	12, 00	94.160.300	0,0 0%	19,30 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	240.750. 000	0,0	-	100	107.878. 000	25	10.850.00 0	25	25.400.0 00	25	17.200.00 0	25	54.328.0 00	100	107.778.00 0	100,00 %	99,91 %	100	107.778.00 0	100 ,00 %	32,31 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		240.750. 000	0,0	-	12	77.878.0 00	2	10.850.00 0	4	25.400.0 00	3	17.200.00 0	3	24.328.0 00	12	77.778.000	100,00 %	99,87 %	12, 00	77.778.000	0,0	32,31 %
Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)		•	0,0	•	1	30.000.0	1	,	1	-	,	-	1	30.000.0 00	1	30.000.000	100,00 %	100,00 %	1,0	30.000.000	0,0 0%	0,00%
															Rata-Rat	a Capai	an Kinerja (%)	100,0 0%	98,80 %				
																Pr	edikat Kinerja	Sanga t	Sanga t				
KECAMATAN								<u> </u>										Tinggi	Tinggi				
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (%)	87, 00	274.426. 250	0,0	-	87	43.450.0 00		-		6.650.00 0		6.250.000		30.550.0 00	1	43.450.000	0,00%	100,00	86, 60	43.450.000		15,83 %

Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan (%)	81.331.5 00	0,0	-	100	14.300.0 00	25		25	750.000	25	2.500.000	25	11.050.0 00	100	14.300.000	100,00 %	100,00	100	14.300.000	0,0 0%	35,19 %
Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	39.165.7 50	0,0	-	22	7.000.00 0	1		3	450.000	6	900.000	13	5.650.00	22	7.000.000	100,00 %	100,00 %	22, 00	7.000.000	0,0	17,87 %
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	42.165.7 50	0,0	-	34	7.300.00 0	1	-	4	300.000	19	1.600.000	11	5.400.00 0	34	7.300.000	100,00 %	100,00 %	34, 00	7.300.000	0,0 0%	17,31 %
Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)	45.165.7 50	0,0	-	100	7.000.00 0	25		25	1.050.00 0	25	2.450.000	25	3.500.00	100	7.000.000	100,00 %	100,00 %	100	7.000.000	0,0	15,50 %
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	45.165.7 50	0,0	-	8	7.000.00	-	-	2	1.050.00	6	2.450.000	-	3.500.00	8	7.000.000	100,00	100,00 %	8,0	7.000.000	0,0	15,50 %
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang difasilitasi (%)	70.745.5 00	0,0	-	100	10.150.0 00	25	-	25	1.850.00 0	25	1.300.000	25	7.000.00	100	10.150.000	100,00 %	100,00 %	100	10.150.000	0,0 0%	28,07

Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		37.872.7 50	0,0	•	4	7.000.00	-	-	-	-	1	300.000	3	6.700.00 0	4	7.000.000	100,00 %	100,00 %	4,0	7.000.000	0,0 0%	18,48 %
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	*Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)		32.872.7 50	0,0	-	3	3.150.00 0	-	-	2	1.850.00 0	1	1.000.000	-	300.000	3	3.150.000	100,00 %	100,00 %	3,0	3.150.000	0,0 0%	9,58%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%)	100	77.183.5 00	0,0	'	100	12.000.0 00	25	-	25	3.000.00 0	25		25	9.000.00	100	12.000.000	100,00 %	100,00 %	100	12.000.000	100 ,00 %	29,07 %
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		47.279.2 50	0,0	-	400	9.000.00	1	-	267	3.000.00	,	-	133	6.000.00	400	9.000.000	100,00 %	100,00 %	400 ,00	9.000.000	0,0 0%	19,04 %
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		29.904.2 50	0,0		300	3.000.00 0	-	-	-	-	-	-	300	3.000.00 0	300	3.000.000	100,00 %	100,00 %	300	3.000.000	0,0 0%	10,03
															Rata-Rat	a Capai	an Kinerja (%)	100,0 0%	100,00				
																Pr	edikat Kinerja	Sanga t Tinggi	Sanga t Tinggi				
PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100 ,00	2.014.86 7.250	0,0	-	100	400.749. 800		13.109.00 0		24.600.0 00		193.176.5 00		169.863. 550	-	400.749.05 0	0,00%	100,00	100	400.749.05 0		19,89

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen)		2.014.86 7.250	0,0	-	100	400.749. 800	25	13.109.00	25	24.600.0 00	25	193.176.5 00	25	169.863. 550	100	400.749.05 0	100,00 %	100,00	100	400.749.05 0	0,0 0%	32,13 %
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		72.043.7 50	0,0	-	8	8.609.75 0	8	8.309.000	-	300.000	-	-	-	-	8	8.609.000	100,00	99,99 %	8,0	8.609.000	0,0	11,95 %
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		1.942.82 3.500	0,0	-	10	392.140. 050	1	4.800.000	1	24.300.0	6	193.176.5 00	2	169.863. 550	10	392.140.05 0	100,00 %	100,00 %	10, 00	392.140.05 0	0,0 0%	20,18
															Rata-Ra	a Capai	an Kinerja (%)	100,0 0%	100,00 %				
																Pr	edikat Kinerja	Sanga t Tinggi	Sanga t Tinggi				
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)	100	615.588. 000	0,0	-	100	103.800. 000		11.660.00		30.900.0 00		15.930.00 0		41.350.0 00	-	99.840.000	0,00%	96,18	100	99.840.000		16,22 %
Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kali)		166.873. 000	0,0	-	100	36.500.0 00	25	3.600.000	25	10.400.0 00	25	6.750.000	25	12.150.0 00	100	32.900.000	100,00 %	90,14	100	32.900.000	0,0 0%	36,26 %
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik		114.000.	0,0		4	29.200.0		3.600.000	1	9.100.00	1	6.750.000	1	6.150.00	4	25.600.000	100,00	87,67 %	4,0 0	25.600.000	0,0 0%	22,46 %

	Kecamatan (Laporan)																					
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	52.873.0 00	0,0	-	4	7.300.00 0	-	-	1	1.300.00	-	-	3	6.000.00 0	4	7.300.000	100,00 %	100,00 %	4,0 0	7.300.000	0,0	13,81 %
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	448.715. 000	0,0	-	100	67.300.0 00	25	8.060.000	25	20.500.0 00	25	9.180.000	25	29.200.0 00	100	66.940.000	100,00 %	99,47 %	100	66.940.000	0,0 0%	14,92 %
Koordinasi/Sinerg i Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	448.715. 000	0,0	-	4	67.300.0 00	1	8.060.000	1	20.500.0	1	9.180.000	1	29.200.0	4	66.940.000	100,00 %	99,47	4,0	66.940.000	0,0	14,92
	) F /													Rata-Rat	a Capai	an Kinerja (%)	100,0 0%	96,18				
															Pr	edikat Kinerja	Sanga t Tinggi	Sanga t Tinggi				

PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan (%)	100	478.395. 000	0,0	-	100	36.033.2 00		-		2.720.00		4.620.000		28.693.2 00	-	36.033.200	0,00%	100,00	100 ,00	36.033.200		7,53%
Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)		478.395. 000	0,0	-	100	36.033.2 00	25	•	25	2.720.00	25	4.620.000	25	28.693.2 00	100	36.033.200	100,00 %	100,00 %	100	36.033.200	0,0 0%	51,00 %
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		111.965. 000	0,0	-	3	7.633.20 0	-	-	-	-	2	3.020.000	1	4.613.20 0	3	7.633.200	100,00	100,00	3,0	7.633.200	0,0	6,82%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		78.215.0 00	0,0	-	3	6.040.00	-	-	-	-	1	1.300.000	2	4.740.00 0	3	6.040.000	100,00 %	100,00 %	3,0 0	6.040.000	0,0 0%	7,72%

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)		105.715. 000	0,0		85	6.040.00	•	_	-	_	-	300.000	85	5.740.00 0	85	6.040.000	100,00 %	100,00 %	85, 00	6.040.000	0,0 0%	5,71%
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan)		73.750.0 00	0,0	,	5	5.440.00 0	-	-	-	-	-	-	5	5.440.00 0	5	5.440.000	100,00 %	100,00 %	5,0 0	5.440.000	0,0	7,38%
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	*Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)		33.750.0 00	0,0	-	8	5.440.00 0	1	-	-	-	-	-	-	5.440.00 0	-	5.440.000	0,00%	100,00 %	0,0	5.440.000	0,0	16,12 %
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		75.000.0 00	0,0	-	8	5.440.00 0	-	-	4	2.720.00 0	-	-	4	2.720.00 0	8	5.440.000	100,00 %	100,00 %	8,0 0	5.440.000	0,0 0%	7,25%
															Rata-Rat		an Kinerja (%)	84,90	100,00 % Sanga				
PROGRAM	Dornantess desc															Pr	edikat Kinerja	Tinggi	t Tinggi				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik (%)	100	169.600. 000	0,0	-	100	17.460.0 00		-		3.150.00 0		1.360.000		12.950.0 00		17.460.000	0,00%	100,00 %	100	17.460.000		10,29 %
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)		169.600. 000	0,0	-	100	17.460.0 00	25	-	25	3.150.00 0	25	1.360.000	25	12.950.0 00	100	17.460.000	100,00 %	100,00 %	100	17.460.000	0,0 0%	35,64 %

Pemerintahan Desa																						
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	72.050.0 00	0,0	-	17	6.020.00	-	-	9	2.400.00	5	1.360.000	3	2.260.00	17	6.020.000	100,00 %	100,00 %	17, 00	6.020.000	0,0 0%	8,36%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	67.050.0 00	0,0	-	34	5.720.00 0	-	-	-	-	-		34	5.720.00	34	5.720.000	100,00 %	100,00 %	34, 00	5.720.000	0,0 0%	8,53%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	30.500.0 00	0,0	-	68	5.720.00 0	-	-	12	750.000	-	·	-	4.970.00 0	12	5.720.000	17,65 %	100,00	12, 00	5.720.000	0,0 0%	18,75 %
														Rata-Rat	a Capai	an Kinerja (%)	73,02 %	100,00				
															Pr	edikat Kinerja	Sedan g	Sanga t Tinggi				
					4.45	2.448.985		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						GRAM	99,77 %	98,87 %						
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM							Sang at Ting gi	Sang at Tingg i						

Sumber : e-Monev TA 2023 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Januari 2024

#### 2.2 Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023.

Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.3** Realisasi Keuangan Kecamatan Sungai Loban Tahun 2023

		Pagu	(Rp)	Realisasi	ŀ
Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sebelum	Setelah	Keuangai	
		Perubahan	Perubahan	Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.572.356.701,00	3.850.955.985,00	3.804.661.174,00	98,80%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.240.290.651,00	3.226.840.935,00	3.192.574.903,00	98,94%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.898.748.551,00	2.820.854.162,00	2.787.301.950,00	98,81%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	341.542.100,00	405.986.773,00	405.272.953,00	99,82%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.941.800,00	386.041.600,00	383.721.191,00	99,40%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.013.800,00	2.027.600,00	2.027.600,00	100,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	153.400.000,00	153.400.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.098.000,00	216.784.000,00	214.463.591,00	98,93%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.046.250,00	130.195.450,00	120.587.080,00	92,62%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.600.000,00	35.600.000,00	26.426.780,00	74,23%

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.446.250,00	94.595.450,00	94.160.300,00	99,54%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.078.000,00	107.878.000,00	107.778.000,00	99,91%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.078.000,00	77.878.000,00	77.778.000,00	99,87%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.450.000,00	43.450.000,00	43.450.000,00	100,00%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.800.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.650.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00%
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%

7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	323.944.800,00	400.749.800,00	400.749.050,00	100,00%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	323.944.800,00	400.749.800,00	400.749.050,00	100,00%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.609.750,00	8.609.750,00	8.609.000,00	99,99%
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	315.335.050,00	392.140.050,00	392.140.050,00	100,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87.500.000,00	103.800.000,00	99.840.000,00	96,18%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.200.000,00	36.500.000,00	32.900.000,00	90,14%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.400.000,00	29.200.000,00	25.600.000,00	87,67%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.800.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	58.300.000,00	67.300.000,00	66.940.000,00	99,47%

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan	58.300.000,00	67.300.000,00	66.940.000,00	99,47%
	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.016.600,00	36.033.200,00	36.033.200,00	100,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.016.600,00	36.033.200,00	36.033.200,00	100,00%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.816.600,00	7.633.200,00	7.633.200,00	100,00%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.020.000,00	6.040.000,00	6.040.000,00	100,00%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.020.000,00	6.040.000,00	6.040.000,00	100,00%
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.720.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00%
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	2.720.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.720.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.380.000,00	17.460.000,00	17.460.000,00	100,00%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.380.000,00	17.460.000,00	17.460.000,00	100,00%

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.660.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	100,00%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.360.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	100,00%
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.360.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	100,00%
		4.037.648.101	4.452.448.985	4.402.193.424	98,87%

Sumber : LKK TA 2023 Kecamatan Sungai loban Kabupaten Tanah Bumbu, Januari 2024

Dari data pada Tabel 2.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan Anggaran Dana dalam membiayai 1 Urusan, 6 Program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan pada Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar **Rp 4.452.448.985,00.** Dari anggaran Perubahan tersebut. realisasinya adalah sebesar Rp **4.402.193.424,00** atau **98,87** % dengan uraian sebagai berikut :

- a. Belanja Non Urusan ; Jumlah anggaran sebesar Rp 3.850.955.985,-dengan realisasi sebesar Rp. 3.804.661.174,- atau 98,80 %.

  Untuk Belanja Tidak Langsung, sisa anggaran disebabkan oleh selisih penganggaran dan realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- b. Belanja Urusan; anggaran sebesar Rp 601.493.000,- dengan realisasi sebesar Rp 597.532.250,- atau 99,34 %.

Untuk Belanja Langsung, sisa anggaran umumnya dikarenakan efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga dengan harga pasar.

# 2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Sungai Loban adalah melaksanakan fungsi sebagai pelayanan dan administrasi di Kabupaten Tanah Bumbu, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2)

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator sesuai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Loban yakni :

**TUJUAN 1 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban,**Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam
Menjaga Ketentraman dan Ketertiban.

TUJUAN 2 : Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani, Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

#### TUJUAN 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang

**Prima,** Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sasaran 4 : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Selain analisis pencapaian tujuan dan sasaran diatas pada bab ini juga disajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Loban sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Sampai dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /		1	TARGET I	RENSTRA	١		REALISASI			
1000AN / OAGANAN	SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	
TUJUAN 1 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
SASARAN 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyaraka dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUJUAN 2 : Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani		56,69 - 57,11 (CC)	57,12 - 59,12 (CC)	59,13 - 59,55 (CC)	60,01 - 69,17 (CC)	69,18 - 69,60 (B)	70,01 - 72,47 (B)	NA belum ada data	NA belum ada data	NA belum ada data	
SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	66,35 - 68,33 (B)	68,34 - 68,44 (BB)	68,45 - 70,47 (BB)	70,48 - 70,62 (BB)	70,63 - 72,69 (A)	72,70 - 87,78 (A)	74,54 (BB)	76,51 (BB)	77,71 (BB)	
TUJUAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,51 (B)	3,61 (B)	3,71 (B)	3,81 (B)	3,91 (B)	4,01 (A-)	3,20 (B-)	belum ada data	belum ada data	
SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,50%	86,75%	87,00%	87,25%	87,50%	87,75%	86,32%	86,91%	87,37%	
SASARAN 4 : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber: Kecamatan Sungai loban Kabupaten Tanah Bumbu, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Loban tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. <u>Tujuan 1</u> "Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban" memiliki satu indikator kinerja yaitu "Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi", dengan Target 100%, dan realisasi 100%;
  - <u>Tujuan 2</u> "Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani" memiliki satu indikator kinerja yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan", dengan Target 100%, untuk realisasi belum ada data;
  - <u>Tujuan 3</u> "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima" memiliki satu indikator kinerja yaitu "Indeks Pelayanan Publik Kecamatan", dengan Target 3,71 (B), untuk realisasi belum ada data.
- b. Sasaran 1. "Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban" memiliki satu indikator kinerja yaitu "Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)" dengan Target 100%. Adapun realisasi 100%, hal ini menunjukkan bahwa Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat masih terkendali. Dari 17 Desa yang ada telah memiliki petugas Linmas masing masing desa 27 orang, tersedianya poskamling untuk menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat sebanyak 124 pos yang tersebar di 17 desa;
  - Sasaran 2. "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" memiliki satu indikator kinerja yaitu "Predikat SAKIP" telah mencapai target, dimana Kecamatan Sungai Loban memperoleh nilai sebesar 77,71 dengan kategori BB yang berarti secara umum implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Sangat Baik berdasarkan *LHE atas SAKIP Tahun 2022 Tanggal 11 April 2023 dari Inspektorat.* Nilai ini lebih besar daripada target, sehingga Capaian pun cukup bagus sebesar 110,27%;
  - Sasaran 3. "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan" memiliki satu indikator kinerja yaitu "Nilai Survey Kepuasan Masyarakat" telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 87,37% dengan kategori Mutu Pelayanan Baik (B). Realisasi Nilai SKM tahun ini lebih besar dari pada target sehingga

Prosentase Capaian pun meningkat 100,42%;

Sasaran 4. "Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan" memiliki satu indikator kineria vaitu "Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan" dengan Target 100%. Adapun untuk realisasi adalah 100% sebagai upaya tercapainya Sasaran sesuai indikator yang meliputi cakupan desa dengan administrasi baik diukur dari desa menyusun dokumen dokumen perencanaan dan kemampuan administrasi lainnya seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, Musrenbangdes, Profil desa dan pelaksanaan Pilkades. Ini menunjukkan bahwa dokumen dokumen tersebut sudah dipenuhi dan dimiliki desa sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sungai Loban

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Loban , maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah memenuhi target sesuai dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran.
- **b.** Beberapa target yang telah ditetapkan pada Renja 2023 sudah sesuai target bahkan melebihi target seperti Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah" dengan indikator "Predikat SAKIP" telah melebihi target, dimana Kecamatan Sungai Loban memperoleh nilai sebesar 77,71 dengan kategori BB yang berarti secara umum implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Sangat Baik berdasarkan *LHE atas SAKIP Tahun 2022 Tanggal 11 April 2023 dari Inspektorat.* Nilai ini lebih besar daripada target, sehingga Capaian pun cukup bagus sebesar 110,27%. Selain itu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan" dengan indikator kinerja "Nilai Survey Kepuasan Masyarakat" telah melebihi target, dimana realisasinya sebesar 87,37% dengan kategori Mutu Pelayanan Baik (B). Realisasi Nilai SKM tahun ini lebih besar dari pada target sehingga Prosentase Capaian pun meningkat 100,42%. Namun beberapa Target masih belum ada data, hal ini dikarenakan sedang dalam proses pengolahan data.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Loban diantaranya:

- Kuantitas dan kualitas SDM aparat kecamatan Sungai Loban masih sangat terbatas sehingga dalam memberikan pelayanan pada masyarakat belum optimal;
- 2. Luas wilayah Kecamatan Sungai Loban tidak sebanding dengan sarana kerja yang tersedia;
- 3. Masih belum optimalnya koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan
- 4. Kurangnya kepedulian masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan;
- 5. Tingginya ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah dalam pembangunan wilayah;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam

rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut:

Faktor Internal dan eksternal

### a. Tantangan

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a) Tuntutan Pelayanan yang baik kepada Masyarakat
- b) Tuntutan masyarakat terhadap kebijakan sektor pertaninan, perkebunan, perikanan, pertambangan, destinasi pariwisata.
- c) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah di wilayah kecamatan
- d) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan Sungai Loban untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan
- e) Tuntutan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

#### b. Peluang

- 1) Tersedianya alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- 2) Tersedianya SDM
- 3) Tersediannya sumber daya alam yang berlimpah
- 4) Tercipta hubungan antara pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat
- 5) Terciptanya koordinasi yang baik antar instansi vertikal dan muspika
- 6) Terjalinnya koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dan seluruh kepala desa

- 7) Adanya program CSR Perusahaan
- 8) Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pencapaian visi dan misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator dan targetnya. Kecamatan Sungai Loban sebagai unsur kewilayahan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah fungsi pelayanan kecamatan sesuai dengan visi dan misi Bupati. Karena itu Kecamatan Sungai Loban perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023-2026.

b. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan Sungai Loban Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Loban perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

### 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

## Tabel 2.3 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tanah Bumbu

### SKPD: Kecamatan Sungai Loban

No		Rancanga	an Awal RKPD Tahun 2	025		На	ısil Analis	sis Kebutuhan Tahun	2025		Cata tan
mor	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja (baru)	Target Capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	Pen ting
	Semua Urusan	•				Semua Urusan					
	Semua Bidang					Semua Bidang					
ı	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	83	3.614.445.062	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	83	4.340.925.793	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	100	3.159.802.562	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	100	3.805.149.743	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD, Sungai Loban	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)	14	2.876.306.912	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD, Sungai Loban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	3.409.172.643	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OPD, Sungai Loban	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Bulan)	13	283.495.650	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OPD, Sungai Loban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	395.977.100	

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	240.914.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	235.629.800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD, Sungai Loban	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (buah)	2	38.100.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD, Sungai Loban	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.613.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD, Sungai Loban	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	15	99.590.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD, Sungai Loban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	85.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD, Sungai Loban	Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (bulan)	12	96.834.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD, Sungai Loban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.400.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD, Sungai Loban	Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	12	1.320.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2.750.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Media/Buku/Eksemp lar)	24	2.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD, Sungai Loban	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	23	2.820.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD, Sungai Loban	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	134.866.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	115.577.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	118.096.250
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD, Sungai Loban	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (bulan)	12	97.577.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD, Sungai Loban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	35.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD, Sungai Loban	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	12	18.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD, Sungai Loban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	82.496.250
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	98.150.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	182.050.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD, Sungai Loban	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara (bulan)	12	48.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	82.050.000
Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD, Sungai Loban	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelih ara*) (unit)	2	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD, Sungai Loban	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi (Unit)	2	100.000.000

	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN					KECAMATAN				
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (%)	87	54.885.250	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (%)	87	61.067.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)	100	16.266.300	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)	100	15.675.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	OPD, Sungai Loban	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Degan Perangkat Daerah Instansi Vertikal (Kali)	16	7.833.150	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	OPD, Sungai Loban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	22	8.250.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	OPD, Sungai Loban	Jumlah SOP Penyelenggaraan pemerintahan yang diterbitkan (Dokumen)	168	8.433.150	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	34	7.425.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)	100	9.033.150	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)	100	12.897.000

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	OPD, Sungai Loban	Sop Pelayanan Publik (Dokumen)	19	9.033.150	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	12.897.000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sara Pelayanan Umum	na	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (%)	100	14.149.100	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (%)	100	16.200.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yan terkait dalam Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana layanan umum (Kali)	4	6.574.550	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	OPD, Sungai Loban	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	13.050.000
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	OPD, Sungai Loban	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	2	7.574.550	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	OPD, Sungai Loban	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	3	3.150.000
Pelaksanaan Urusai Pemerintahan yang Dilimpahkan kepad Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%)	100	15.436.700	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%)	100	16.295.000

### Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Loban Tahun 2025 - \*iws

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	OPD, Sungai Loban	Jumlah pelayanan perizininan diterbitkan (dokumen)	448	5.980.850	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	OPD, Sungai Loban	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakann (Dokumen)	12	9.375.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Pelayanan Non Perizinan diterbitkan (Dokumen)	941	9.455.850	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	400	6.920.000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	402.973.450	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	389.244.650	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi (%)	100	402.973.450	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi (%)	100	389.244.650	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	OPD, Sungai Loban	Jumlah usulan desa yang masuk ke kecamatan (MusrenbangKec.) (Dokumen)	47	388.564.700	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	OPD, Sungai Loban	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	8	7.350.000	

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang sinergi dengan pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan (PKK,Lomba Desa,MTQ Kec/Kab (Dokumen)	6	14.408.750	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	10	381.894.650
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)	100	123.117.600	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)	100	110.650.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi (%)	100	33.374.600	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi (%)	100	33.500.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	OPD, Sungai Loban	Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (kali)	12	22.800.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	29.450.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	OPD, Sungai Loban	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kali)	12	10.574.600	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	OPD, Sungai Loban	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4.050.000

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100	89.743.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100	77.150.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	OPD, Sungai Loban	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan Republik Indonesia (Kali)	4	89.743.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	OPD, Sungai Loban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	77.150.000	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan (%)	100	95.679.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan (%)	100	69.541.600	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	100	95.679.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	100	69.541.600	

Pembinaan Wawasan	OPD,	Pembinaan Wawasan	3	14.750.000	Pembinaan Wawasan	OPD,	Jumlah Orang yang	85	5.656.600	
Kebangsaan dan	Sungai	Kebangsaan dan	3	14.730.000	Kebangsaan dan	Sungai	Mengikuti		3.030.000	
Ketahanan Nasional	Loban	ketahanan Nasional			Ketahanan Nasional	Loban	Pembinaan			
dalam rangka	Lobaii	(kali)			dalam rangka	Lobali	Wawasan			
Memantapkan		(Kall)			Memantapkan		Kebangsaan dan			
Pengamalan					Pengamalan		Ketahanan Nasional			
_					_		dalam rangka			
Pancasila,					Pancasila,		Memantapkan			
Pelaksanaan Undang-					Pelaksanaan Undang-		Pengamalan			
Undang Dasar Negara					Undang Dasar Negara		Pancasila,			
Republik Indonesia					Republik Indonesia		Pelaksanaan			
Tahun 1945,					Tahun 1945,		Undang-Undang			
Pelestarian Bhinneka					Pelestarian Bhinneka		Dasar Negara			
Tunggal Ika serta					Tunggal Ika serta		Republik Indonesia			
Pemertahanan dan					Pemertahanan dan		Tahun 1945,			
Pemeliharaan					Pemeliharaan		Pelestarian Bhinneka			
Keutuhan Negara					Keutuhan Negara		Tunggal Ika serta			
Kesatuan Republik					Kesatuan Republik		Pemertahanan dan			
Indonesia					Indonesia		Pemeliharaan			
							Keutuhan Negara			
							Kesatuan Republik			
							Indonesia (Orang)	0.5		
Pembinaan Persatuan	OPD,	Pembinaan persatuan	3	22.393.000	Pembinaan Persatuan	OPD,	Jumlah Orang yang	85	4.860.000	
dan Kesatuan Bangsa	Sungai	dan Kesatuan Bangsa			dan Kesatuan Bangsa	Sungai	Mengikuti			
	Loban	(kali)				Loban	Pembinaan			
							Persatuan dan			
							Kesatuan Bangsa			
							(Orang)			
Pembinaan	OPD,	Pembinaan	3	15.000.000	Pembinaan	OPD,	Jumlah Orang yang	85	4.860.000	
Kerukunan Antarsuku	Sungai	Kerukunan Antarsuku			Kerukunan Antarsuku	Sungai	Mengikuti			
dan Intrasuku, Umat	Loban	dan Intrask, Umat			dan Intrasuku, Umat	Loban	Pembinaan			
Beragama, Ras, dan		Beragama,Ras dan			Beragama, Ras, dan		Kerukunan Antar			
Golongan Lainnya		Golongan (kali)			Golongan Lainnya		Suku dan Intra Suku			
Guna Mewujudkan					Guna Mewujudkan		, Umat Beragama,			
Stabilitas Keamanan					Stabilitas Keamanan		Ras, dan Golongan			
Lokal, Regional, dan					Lokal, Regional, dan		Lainnya Guna			
Nasional					Nasional		Mewujudkan			
							Stabilitas			
							Keamanan Lokal,			
							Regional, dan			
							Nasional (Orang)			

	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Konflik Sosial yang tertangani (Konflik)	4	21.143.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan)	5	4.560.000
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	OPD, Sungai Loban	Jumlah sosialisasi kesadaran berdemokrasi berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan (Kali)	2	6.750.000	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	OPD, Sungai Loban	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	8	10.680.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (kali)	12	15.643.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	OPD, Sungai Loban	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	38.925.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik (%)	100	27.820.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik (%)	100	64.389.750
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	100	27.820.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	100	64.389.750
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	OPD, Sungai Loban	Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kali)	17	6.100.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	OPD, Sungai Loban	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	17	23.760.000

Fasilitasi Pengelolaan	OPD,	Pembinaan	17	7.310.000	Fasilitasi Pengelolaan	OPD,	Jumlah Dokumen	34	26.520.000	
Keuangan Desa dan	Sungai	Pengelolaan			Keuangan Desa dan	Sungai	yang Difasilitasi			
Pendayagunaan Aset	Loban	keuangan Desa dan			Pendayagunaan Aset	Loban	dalam rangka			
Desa		Pendayagunaan Aset			Desa		Pengelolaan			
		Desa (kali)					Keuangan Desa dan			
							Pendayagunaan			
							Aset Desa			
							(Dokumen)			
Fasilitasi Penyusunan	Sungai	Jumlah Dokumen	17	14.410.000	Fasilitasi Penyusunan	Sungai	Jumlah Dokumen	68	14.109.750	
Perencanaan	Loban	Perencanaan			Perencanaan	Loban	Fasilitasi dalam			
Pembangunan		Pembangunan			Pembangunan		rangka			
Partisipatif		Partisipatif yang			Partisipatif		Perencanaan			
		Difasilitasi (Dokumen)					Pembangunan			
							Partisipatif			
							(Dokumen)			
			TOTAL	4.318.920.362				TOTAL	5.035.818.793	

Sumber: Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Januari 2024

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU

### 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, yaitu:

- (1) **Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban** dengan indikator tujuan "Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi".
- (2) Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan".
- (3) **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima** dengan indikator tujuan "Indeks Pelayanan Publik Kecamatan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yaitu

(1) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban, dengan indikator sasaran "Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)".

- (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran "Predikat SAKIP".
- (3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan indikator sasaran "Nilai Survey Kepuasan Masyarakat".
- (4) Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dengan indikator sasaran "Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran RenjaKecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN 1 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi	Persen	100%
SASARAN 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	Persen	100%
TUJUAN 2 : Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan	Indeks	69,18 - 69,60 (B)
SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Indeks	70,63 - 72,69 (A)

TUJUAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	3,91 (B)
SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	87,50%
SASARAN 4 : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100%

Sumber : Renstra 2021-2026 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Januari 2024

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

- 1. Mempedomani RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
- 2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara khusus, Kecamatan Sungai Loban memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan (1) Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi, (2) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan, (3) Indeks Pelayanan Publik Kecamatan, dan indikator sasaran (1) Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman), (2) Predikat SAKIP, (3) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, (4) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- 3. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
- 5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
- 6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
- 2. Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 kegiatan, dan 35 sub Kegiatan;
- 3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebesar Rp **5.135.818.793**,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian:
  - a. Rp **4.440.925.793** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang (program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin).
  - b. Rp **694.893.000,-** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1 (T-C.33) Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja		Rencana	Tahun 2025		Catatan Penting		an Maju Rencana ahun 2026			
		K	ode		Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Semua Urusan								
0	0				Semua Bidang								
0	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)		83	4.440.925.793	APBD		83	4.440.925.793
0	0	1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000	APBD	Penambahan Kegiatan baru untuk tahun rencana 2025		100.000.000
0	0	1	2. 01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	OPD, Sungai Loban	1	50.000.000	APBD	Penambahan Sub Kegiatan baru untuk tahun rencana 2025	1	50.000.000
0	0	1	2. 01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	OPD, Sungai Loban	1	50.000.000	APBD	Penambahan Sub Kegiatan baru untuk tahun rencana 2025	1	50.000.000

0	0	1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangat daerah yang terselenggara dengan baik (%)		100	3.805.149.743	APBD	100	3.805.149.743
0	0	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	OPD, Sungai Loban	28	3.409.172.643	APBD	28	3.409.172.643
0	0	1	2. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	OPD, Sungai Loban	1	395.977.100	APBD	1	395.977.100
0	0	1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	235.629.800	APBD	100	235.629.800
0	0	1	2. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	OPD, Sungai Loban	1	1.613.800	APBD	1	1.613.800
0	0	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	OPD, Sungai Loban	1	85.000.000	APBD	1	85.000.000
0	0	1	2. 06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	OPD, Sungai Loban	1	9.400.000	APBD	1	9.400.000
0	0	1	2. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	OPD, Sungai Loban	1	2.750.000	APBD	1	2.750.000
0	0	1	2. 06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	OPD, Sungai Loban	1	2.000.000	APBD	1	2.000.000
0	0	1	2. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	OPD, Sungai Loban	1	134.866.000	APBD	1	134.866.000

0	0	1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100	118.096.250	APBD	100	118.096.250
0	0	1	2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	OPD, Sungai Loban	1	35.600.000	APBD	1	35.600.000
0	0	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	OPD, Sungai Loban	1	82.496.250	APBD	1	82.496.250
0	0	1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100	182.050.000	APBD	100	182.050.000
0	0	1	2. 09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	OPD, Sungai Loban	7	82.050.000	APBD	7	82.050.000
0	0	1	2. 09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	OPD, Sungai Loban	2	100.000.000	APBD	2	100.000.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN					APBD		
7	1				KECAMATAN					APBD		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (%)		87	61.067.000	APBD	87	61.067.000
7	1	2	2. 01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)		100	15.675.000	APBD	100	15.675.000

7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	OPD, Sungai Loban	22	8.250.000	APBD	22	8.250.000
7	1	2	2. 01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	OPD, Sungai Loban	34	7.425.000	APBD	34	7.425.000
7	1	2	2. 02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)		100	12.897.000	APBD	100	12.897.000
7	1	2	2. 02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	OPD, Sungai Loban	8	12.897.000	APBD	8	12.897.000
7	1	2	2. 03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (%)		100	16.200.000	APBD	100	16.200.000
7	1	2	2. 03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	OPD, Sungai Loban	2	13.050.000	APBD	2	13.050.000
7	1	2	2. 03	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	OPD, Sungai Loban	3	3.150.000	APBD	3	3.150.000

7	1	2	2. 04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%)		100	16.295.000	APBD	100	16.295.000
7	1	2	2. 04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakann (Dokumen)	OPD, Sungai Loban	12	9.375.000	APBD	12	9.375.000
7	1	2	2. 04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	OPD, Sungai Loban	400	6.920.000	APBD	400	6.920.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku (%)		100	389.244.650	APBD	100	389.244.650
7	1	3	2. 01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi (%)		100	389.244.650	APBD	100	389.244.650
7	1	3	2. 01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	OPD, Sungai Loban	8	7.350.000	APBD	8	7.350.000
7	1	m	2. 01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	OPD, Sungai Loban	10	381.894.650	APBD	10	381.894.650

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)		100	110.650.000	APBD	100	110.650.000
7	1	4	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi (%)		100	33.500.000	APBD	100	33.500.000
7	1	4	2. 01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	OPD, Sungai Loban	4	29.450.000	APBD	4	29.450.000
7	1	4	2. 01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	OPD, Sungai Loban	4	4.050.000	APBD	4	4.050.000
7	1	4	2. 02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)		100	77.150.000	APBD	100	77.150.000
7	1	4	2. 02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	OPD, Sungai Loban	4	77.150.000	APBD	4	77.150.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan (%)		100	69.541.600	APBD	100	69.541.600
7	1	5	2. 01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)		100	69.541.600	APBD	100	69.541.600

7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	OPD, Sungai Loban	85	5.656.600	APBD	85	5.656.600
7	1	5	2. 01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	OPD, Sungai Loban	85	4.860.000	APBD	85	4.860.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	OPD, Sungai Loban	85	4.860.000	APBD	85	4.860.000
7	1	5	2. 01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan)	OPD, Sungai Loban	5	4.560.000	APBD	5	4.560.000
7	1	5	2. 01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	OPD, Sungai Loban	8	10.680.000	APBD	8	10.680.000
7	1	5	2. 01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	OPD, Sungai Loban	4	38.925.000	APBD	4	38.925.000

7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik (%)		100	64.389.750	APBD	100	64.389.750
7	1	6	2. 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)		100	64.389.750	APBD	100	64.389.750
7	1	6	2. 01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	OPD, Sungai Loban	17	23.760.000	APBD	17	23.760.000
7	1	6	2. 01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	OPD, Sungai Loban	34	26.520.000	APBD	34	26.520.000
7	1	6	2. 01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	Sungai Loban	68	14.109.750	APBD	68	14.109.750
									5.135.818.793			5.135.818.793

Sumber: Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Februari 2024

## BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rancangan Awal Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### **a.** Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 antara lain :

- 1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Sungai Loban pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2. Penyusunan Renja Kecamatan Sungai Loban ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Sungai Loban Tahun 2021-2026.
- 3. Penyusunan Renja Kecamatan Sungai Loban ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

#### **b.** Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- 2. Berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

### c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 untuk setiap triwulannya;
- 2. Pemetaan terhadap rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 3. Pemetaan terhadap rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Permendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Awal

Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rancangan Awal Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2025.

Sungai Loban, 05 Februari 2024

AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P Pembina Tingkat I / IVb

NIP 19710810 199803 1 012